

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KEMANDIRIAN DAERAH PADA KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Baihaqi

ABSTRACT

This research aim are to analyse the level of dependent fiscal between local govement central Bengkulu with central government seen form degree of fiscal decentralization. second, analysing the existence of relation between monetary management area (transfer of central government, Earnings of Genuiness Area, and Invesment Area) with Independence Area. This research use secondary data of year 2009 to 2011. This data is analysed using ladder correlation of spearman.

Pursuant to calculation known that result of from r_s for the hypothesis of H_1 equal to 0,400. While r_s H_2 equal to 0,900, and r_s H_3 equal to 0,058 with storey;level of signifikan 0,05 with $n=9$ $\rho(\alpha)= 0,700$. With critical area of r_s $\rho(\alpha)$. Hence can be concluded that first Hypothesis not yet deflected to be accepted, accepted second hypothesis, and third hypothesis not yet is acceptable.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada umumnya Negara didirikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan rakyat, melindungi kehidupan bangsa serta mencukupi kepentingan-kepentingan rakyatnya. Untuk mencapai tujuan tersebut negara membentuk suatu organisasi yang disertai tugas untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan negara agar terlaksana dengan baik. Organisasi yang dibentuk dan disertai tugas kemudian diberi kekuasaan oleh Negara berdasarkan peraturan dan perUndang-Undangan yang dikenal dengan istilah pemerintah. Dengan demikian, pemerintah merupakan suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk menjalankan tugas-

tugas dan kepentingan suatu negara berdasar pada perUndang-Undangan dan peraturan lainnya yang berbentuk konstitusi (Saefullah, 2000).

Salah satu alasan penyelenggaraan otonomi daerah adalah agar pembangunan di daerah berjalan seiring dengan pembangunan pusat. Sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) seharusnya disusun berdasar kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN) Pemerintah Pusat, sebelum nantinya diterjemahkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing SKPD. Ini merupakan bentuk koreksi atas pelaksanaan pembangunan ekonomi yang selama ini

menitik beratkan pembangunan di pusat dan kurang memperhatikan perkembangan pembangunan daerah. Dengan kebijakan sentralistik yang menitik beratkan pembangunan di pusat ini menyebabkan terjadinya disparitas dan ketidakseimbangan pelaksanaan pembangunan di pusat dan daerah. Akhirnya hampir seluruh potensi ekonomi di daerah tersedot ke pusat sehingga daerah tidak mampu berkembang secara memadai. Jadi dengan otonomi daerah terkandung maksud untuk memperbaiki kekeliruan selama ini dengan cara memberikan peluang kepada daerah untuk mendapatkan dana lebih besar dan kebebasan untuk mengelolanya sendiri.

Sejak timbulnya krisis ekonomi yang dipicu oleh krisis moneter pertengahan 1997, pembangunan di Indonesia nyaris terhenti karena ketidakmampuan pemerintah dalam membiayai proyek pembangunan yang disebabkan kurangnya pendapatan pemerintah, khususnya dari sektor pajak dan retribusi (Kuncoro, 1997).

Keleluasaan dalam usaha menggali sumber-sumber penerimaan tersebut, banyak daerah yang memikirkan bagaimana meningkatkan tarif pajak dan retribusi yang baru. Hal

ini menimbulkan keresahan di daerah, karena rakyat khawatir akan membayar pajak lebih banyak dibanding sebelum adanya otonomi daerah. Agar hal yang dikhawatirkan tersebut tidak terjadi maka peneliti ingin meneliti bagaimana potret pengelolaan keuangan daerah dan kemandirian daerah setelah adanya otonomi daerah. Diharapkan dengan otonomi, semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah yang dimilikinya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian ini bagaimana hubungan pengelolaan keuangan daerah (Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Asli Daerah, dan Investasi Daerah) dengan kemandirian keuangan daerah?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan dan menganalisis hubungan pengelolaan keuangan daerah (Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Asli Daerah, dan Investasi Daerah) dengan kemandirian keuangan daerah.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian dari pemerintah pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat.

Dengan kondisi seperti ini, peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (*enginee of growth*). Daerah juga diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan efek *multiplier* yang besar (Suparmoko, 2002).

Sejalan dengan upaya untuk memantapkan kemandirian pemerintah daerah yang dinamis dan bertanggungjawab, serta mewujudkan pemberdayaan dan otonomi daerah

dalam lingkup yang lebih nyata, maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme sumber daya manusia dan lembaga-lembaga publik di daerah dalam mengelola sumber daya daerah. Upaya-upaya untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sehingga otonomi yang diberikan kepala daerah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari hal tersebut di atas kemandirian fiskal menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi, dan lain-lain. Karena itu otonomi daerah dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian fiskal yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintahan daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan sebagainya (Radianto, 1997).

Salah satu aspek penting dari otonomi daerah secara keseluruhan adalah desentralisasi fiskal daerah. Pengertian otonomi fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah seperti pajak, retribusi dan lain-lain. Karena itu pemerintah daerah secara financial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD (Radianto, 1997).

Menurut Sugiyanto (2002), ukuran yang digunakan adalah perbandingan antara PAD terhadap pengeluaran pemerintah kabupaten/kota. Rumusan perhitungan adalah R/E (R = PAD dan E = Pengeluaran Rutin). Apabila rasio tersebut semakin tinggi, berarti kecenderungan tingkat kemandirian tersebut akan semakin besar. Desentralisasi fiskal daerah menunjukkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan, untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan tersebut maka dilakukan analisis kinerja dengan menggunakan parameter Derajat Desentralisasi Fiskal (Purnomo, 2009).

Menurut Purnomo 2009 Derajat Desentralisasi Fiskal dapat diukur secara matematis sebagaimana sebagai berikut:

- a) $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan daerah (TPD)}} \times 100\%$
- b) $\frac{\text{Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak untuk Daerah (BHPBP)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$
- c) $\frac{\text{SUM}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$

Dimana :

TPD = Total Penerimaan Daerah

TPD = PAD + BHPBP + SUM

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BHPBP = Bagi Hasil dan Bukan Pajak

SUM = Sumbangan Pemerintah Pusat

Berdasarkan deskripsi dan analisis APBD 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, menyatakan rasio kemandirian ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio transfer ke daerah termasuk di dalamnya dana perimbangan terhadap total pendapatan. Dua rasio yang mewakili tersebut, meskipun menunjukkan kemandirian daerah, namun memiliki makna yang berbeda atas angka-angkanya.

Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, proses pengelolaan anggaran memiliki implikasi yang sangat luas terhadap pelaksanaan berbagai

kebijakan pemerintah daerah, baik secara ekonomis maupun politis. Setiap daerah memiliki masalah proporsi kebijakan keuangan yang berbeda, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan keuangan daerah, struktur sosial dan ekonomi penduduk, budaya, politis dan aturan yang berlaku dari pemerintah pusat (Halim, 2004).

Faktor keuangan merupakan hal yang penting dalam setiap kegiatan pemerintah, karena hamper tidak ada kegiatan pemerintah yang tidak membutuhkan biaya (Suparmoko, 2002). Sehubungan dengan posisi keuangan ini, ditegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memebrikan pelayanan terhadap masyarakat dan melaksanakan pembangunan.

Kabupaten Bengkulu Tengah berdiri pada Akhir tahun 2008, sehingga masih sangat bergantung dengan Pemerintah Pusat. Namun sudah mulai menuju ke pola hubungan konsultatif dimana campur tangan pemerintah pusat semakin berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah dianggap

sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

Transfer dana dari pemerintah pusat ini dilakukan dengan mekanisme dana perimbangan, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Dewi, 2002). Transfer dari pemerintah pusat atau disebut juga dengan perimbangan keuangan ini merupakan suatu sistem pembiayaan dalam kerangka Negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan pemerintah pusat dan daerah (Marzoeki, 2009). Selain itu juga merupakan pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut.

Bentuk hubungan transfer pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan implikasinya terhadap pengelolaan keuangan daerah telah melahirkan berbagai persepsi. Transfer pemerintah pusat merupakan salah satu sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah yang nantinya akan dilaporkan dalam perhitungan APBD. Tujuan dari

transfer ini adalah mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintahan dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh daerah (Simanjuntak, 2001). Sehingga untuk hipotesis yang pertama dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Ada hubungan antara Transfer Pemerintah Pusat dengan Kemandirian Keuangan Daerah.

Masalahnya proporsi penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkulu Tengah jumlahnya masih kecil, sehingga terjadi ketidakseimbangan keuangan daerah antara kemampuan dengan kebutuhan. Kondisi inilah yang telah menciptakan ketergantungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah pada pemerintah pusat, sehingga otonomi yang diharapkan dapat menciptakan kemandirian tersebut mungkin akan sulit dilaksanakan, maka perlu adanya kajian mengenai kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkulu Tengah guna mendukung Kemandirian Daerah. Sehingga hipotesis yang kedua dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Ada hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Kemandirian Keuangan Daerah.

Investasi Daerah merupakan Penyertaan modal pemerintah daerah, dana pemerintah daerah ini dialokasikan kepada badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta yang diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah melalui bagian labanya. Investasi Daerah mampu berperan sebagai pendukung perekonomian daerah dengan memberikan kontribusi kepada APBD, baik dalam bentuk pajak maupun deviden dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui *multiplier effect* yang tercipta dari kegiatan bisnis yang efisien seperti bertambahnya lapangan kerja dan kepedulian sosial (Kuncoro, 1997).

Investasi pemerintah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga mampu berperan sebagai kekuatan ekonomi melalui pola kemitraan. Diharapkan sebagai perusahaan swasta dalam dan luar negeri berminat melakukan kerjasama dengan BUMD terpilih untuk selanjutnya membentuk *Joint Venture/Joint Operation Company*. Adapun Yang dapat diinvestasikan oleh Pemerintah Daerah adalah kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, baik berupa uang maupun

barang dan kekayaan daerah yang dipisahkan (Purnomo, 2009).

Investasi pemerintah pada BUMD juga mampu berperan sebagai kekuatan ekonomi melalui pola kemitraan. Diharapkan sebagai perusahaan swasta dalam dan luar negeri berminat melakukan kerjasama dengan Badan BUMD terpilih untuk selanjutnya membentuk *Joint Venture/Joint Operation Company* (Haryanto, 2009).

Adapun Yang dapat diinvestasikan oleh Pemerintah Daerah adalah kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, baik berupa uang maupun barang dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sehingga hipotesis yang ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Ada hubungan antara Investasi Daerah dengan Kemandirian Keuangan Daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang ilmiah dan sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungannya (Sugiyono, 2008).

Penelitian ini mengamati variabel pengelolaan keuangan daerah (Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Asli

Daerah (PAD), dan investasi daerah) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

A. Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1) Transfer Pemerintah Pusat; Variabel ini diukur dengan menggunakan jumlah Transfer Pemerintah Pusat dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam akun Pendapatan, berupa pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum dan Alokasi Khusus.
- 2) Pendapatan Asli Daerah (PAD); PAD adalah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah. Variabel ini diukur dengan menggunakan jumlah Pendapatan Asli Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

- 3) Investasi Daerah; Variabel ini diukur dengan menggunakan jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah dalam akun Pengeluaran Pembiayaan yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran.

B. Kemandirian Keuangan Daerah

- 1) Tingkat Kemandirian Daerah; Kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan masih sering mengalami kendala berupa rendahnya kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD nya. Menurut Sugiyanto 2002 Indikator rendahnya kemampuan daerah ini dapat dilihat dari indeks kemampuan Rutin (IKR) daerah, yang diperoleh dari besarnya perubahan PAD terhadap pengeluaran rutin daerah dalam persentase tahun yang sama, dengan ukuran yang digunakan adalah perbandingan antara PAD terhadap pengeluaran pemerintah kabupaten. Rumusan perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$IKR = \frac{R}{E}$$

Dimana :

IKR = Indeks Kemampuan Rutin

R = Pendapatan Asli Daerah

E = Pengeluaran Rutin

Apabila rasio tersebut semakin tinggi, berarti kecenderungan tingkat kemandirian tersebut akan semakin besar.

- 2) Derajat Desentralisasi Fiskal; Desentralisasi fiskal daerah menunjukkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan, untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan tersebut maka dilakukan analisis kinerja dengan menggunakan parameter Derajat Desentralisasi Fiskal. Derajat Desentralisasi Fiskal dapat diukur secara matematis sebagaimana sebagai berikut:

- a) $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan daerah (TPD)}} \times 100\%$
- b) $\frac{\text{Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak untuk Daerah (BHPBP)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$
- c) $\frac{\text{SUM}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$

Dimana :

TPD = Total Penerimaan Daerah

TPD = PAD + BHPBP + SUM

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BHPBP = Bagi Hasil dan Bukan Pajak

SUM = Sumbangan Pemerintah Pusat

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Kabupaten Bengkulu Tengah. Peneliti menggunakan teknik pengambilan

sampel berupa data laporan keuangan Kabupaten Bengkulu Tengah selama tiga Tahun terakhir (2009-2011), yang diperoleh pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bengkulu Tengah.

Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan adalah Korelasi Jenjang Spearman, Metode ini diperlukan untuk mengukur keeratan antara dua variabel dimana dua variabel tersebut tidak harus berdistribusi normal. Korelasi Jenjang Spearman ini biasanya dinotasikan dengan r_s (Fauzy, 2011). Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung koefisien korelasi sperman Jika data $n < 10$, rumus yang digunakan:

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

Pengujian hipotesis secara statistik non parametrik dengan menggunakan Korelasi Jenjang Spearman ini digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel pengelolaan keuangan daerah yang dalam hal ini berupa transfer

pemerintah pusat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Investasi daerah mempunyai hubungan nyata terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Untuk daerah kritis untuk $n < 10$, H_0 ditolak jika nilai $r_s > \rho_s(\alpha)$, nilai $\rho_s(\alpha)$ dapat dilihat pada tabel r untuk Spearman (Fauzy, 2011).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, Penelitian ini menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dari tahun 2009 sampai dengan 2011 untuk melihat dari sisi kuantitatif menggunakan rasio kinerja keuangan mengenai kemandirian daerah, penulis juga meneliti bagaimana hubungan antara pengelolaan keuangan daerah yang dalam penelitian ini terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Asli Daerah, dan Investasi Daerah dengan kemandirian daerah. Laporan keuangan yang digunakan adalah Laporan Realisasi APBD.

Sesuai dengan tujuan penelitian yang diarahkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara pengelolaan keuangan daerah dengan kemandirian

daerah, dalam hal ini pengelolaan keuangan daerah meliputi transfer pemerintah pusat, pendapatan asli daerah dan investasi daerah. Dalam rangka untuk membuktikan adanya hubungan antara pengelolaan keuangan daerah dengan kemandirian keuangan daerah, dirumuskan dalam tiga hipotesis dan untuk menguji ketiga hipotesis tersebut digunakan alat analisis korelasi jenjang Spearman, karena data yang digunakan kurang dari 10 ($n < 10$), data yang digunakan berupa *data series* selama 3 tahun atau 9 periode Caturwulan yaitu dari tahun 2009 sampai dengan 2011. Hasil dari pengujian hipotesis yang pertama, yaitu:

- 1) ada hubungan antara transfer pemerintah pusat dengan kemandirian keuangan daerah, dengan menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ daerah kritis terima H_1 jika $r_s > \rho_s(\alpha)$ dalam penelitian ini hipotesis yang pertama memiliki nilai $r_s = 0,400$ dan Nilai $\rho_s(0,05) = 0,700$ pada $n=9$ (Lihat Tabel r untuk spearman pada lampiran), Karena nilai $r_s = 0,400 < 0,700 = \rho_s(0,05)$ Maka hipotesis yang pertama tidak

berhasil diterima. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, tidak ada hubungan antara transfer pemerintah pusat dengan kemandirian keuangan daerah. Hal ini diduga dikarenakan komponen penentu transfer pemerintah pusat itu tidak sama dengan komponen penentu kemandirian daerah. Seperti kita ketahui komponen penentu transfer pemerintah pusat itu terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sedangkan komponen penentu kemandirian yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran rutin daerah, karena tidak adanya keterkaitan antara komponen penentu transfer pemerintah pusat dengan komponen penentu kemandirian daerah, sehingga hipotesis pertama tidak berhasil diterima atau dengan kata lain tidak ada hubungan antara transfer pemerintah pusat dengan kemandirian daerah. Hal ini dapat juga dikarenakan data yang digunakan masih belum cukup untuk melakukan pembuktian dugaan bahwa ada hubungan antara

transfer pemerintah pusat dengan kemandirian daerah. Kabupaten Bengkulu Tengah baru berdiri pada akhir tahun 2008, sehingga Kabupaten Bengkulu Tengah baru menghasilkan 3 laporan keuangan, yaitu laporan keuangan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Laporan keuangan ini lah yang kemudian dijadikan data dalam penelitian ini.

- 2) untuk hipotesis kedua yaitu Ada hubungan antara pendapatan asli daerah dengan kemandirian keuangan daerah, Dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ dengan daerah kritis terima H_1 jika $r_s > \rho_s(\alpha)$. Dalam penelitian ini $r_s = 0,900$ Nilai $\rho_s(0,05) = 0,700$ pada $n=9$ Lihat tabel r spearman (Lihat Tabel r untuk spearman pada lampiran) Karena nilai $r_s = 0,900 > 0,700 = \rho_s(0,05)$, Maka Hipotesis kedua diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan ada hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan kemandirian keuangan daerah.
- 3) Hipotesis ketiga, ada hubungan antara investasi daerah dengan kemandirian keuangan daerah, Dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ dengan daerah kritis terima H_3

jika $r_s > \rho_s(\alpha)$, hasil penelitian ini $r_s = 0,058$, dimana Nilai $\rho_s(0,05) = 0,700$ pada $n = 9$, karena nilai $r_s = 0,058 < 0,700 = \rho_s(0,05)$, Maka H_3 belum berhasil diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara Investasi Daerah dengan kemandirian keuangan daerah. Ditolaknya hipotesis yang ketiga ini berhubungan dengan tidak adanya data investasi daerah pada tahun 2011, hal ini dikarenakan pada tahun 2011 Kabupaten Bengkulu Tengah tidak merealisasikan pengeluaran pembiayaan dari anggaran penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Rp1.069.479.809,00. Seperti diketahui dari laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2009 Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan penyertaan modal investasi pada Bank Bengkulu sebesar Rp100.000.000,00 dan pada tahun 2010 senilai Rp1.000.000.000,00. Sehingga pada akhir tahun 2011 saldo investasi masih sebesar Rp1.100.000.000,00 yang seluruhnya itu masih berasal dari penyertaan modal Pemerintah

Daerah pada PT Bank Bengkulu selama tahun anggaran 2009 dan 2010. Dimana hal ini merupakan investasi permanen Pemerintah Kabupaten Bengkulu tengah pada PT Bank Bengkulu yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Pencatatan nilai investasi pada PT Bank Bengkulu menggunakan metode harga perolehan, karena kepemilikan saham kurang dari 20% dan kemampuan dalam pengendalian atau pengaruh Kabupaten Bengkulu Tengah dalam mempengaruhi kebijakan PT Bank Bengkulu tidak signifikan. Selama tahun 2010 pendapatan deviden yang diterima Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah hanya senilai Rp13.288.065,86

PENUTUP

Kesimpulan:

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disajikan dalam bentuk ringkasan penelitian, sebagai berikut:

- 1) Hasil penelitian pada Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan rasio PAD yang sangat rendah dan rasio transfer yang sangat tinggi dalam tiga tahun terakhir. Fakta ini semakin menguatkan bahwa dilihat

dari derajat desentralisasi fiskal, kemandirian kabupaten Bengkulu tengah untuk mendanai belanja mereka sendiri masih sangat kecil. Hasil penelitian membuktikan tidak ada hubungan antara transfer pemerintah pusat dengan kemandirian keuangan daerah.

- 2) Hasil dari analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa indeks kemampuan rutinnya masih sangat kecil hal ini dilihat dari Indeks Kemampuan Rutin Daerah sebagai indikator untuk mengetahui tinggi rendahnya kemampuan daerah dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Hasil penelitian membuktikan ada hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan kemandirian keuangan daerah.
- 3) Dalam penelitian ini pengelolaan keuangan daerah meliputi transfer pemerintah pusat, pendapatan asli daerah dan investasi daerah. Hasil penelitian membuktikan tidak ada hubungan antara Investasi Daerah dengan kemandirian keuangan daerah.

Implikasi Penelitian

- 1) Untuk Pemerintah Daerah; Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah

Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah terkait dengan pemanfaatan dan peningkatan potensi penerimaan PAD. pengurangan transfer pemerintah pusat, melaksanakan investasi pada usaha-usaha yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.

- 2) Untuk Pemerintah Pusat; Pemerintah pusat diharapkan mengetahui masalah atau penyebab ketidakmandirian suatu daerah dengan menganalisis pengelolaan keuangan terutama untuk daerah yang baru dimekarkan seperti Kabupaten Bengkulu tengah.
- 2) Untuk Masyarakat; Masyarakat diharapkan aktif mengontrol dan menilai kinerja pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan daerah, melalui wakil rakyat di DPRD maupun melalui Lembaga-lembaga Sosial Masyarakat (LSM).

Keterbatasan dan Rekomendasi Penelitian

- (1) Terbatasnya data yang bisa diteliti, dikarenakan Kabupaten Bengkulu Tengah baru dimekarkan sehingga laporan keuangan yang dapat diteliti hanya tiga tahun atau sembilan periode pelaporan caturwulan saja. Penelitian selanjutnya hendaknya

menggunakan data yang lebih banyak, misalnya dengan menambah jumlah daerah yang diteliti.

- 2) Pengukuran tingkat kemandirian daerah belum ada aturan yang baku, sehingga diasumsikan dengan tingkat kemandirian yang diukur dari persentase jumlah Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan jumlah pengeluaran rutin daerah. Peneliti selanjut hendaknya menggunakan ukuran lain yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Anggreani. 2002. *Pengaruh Dana Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan*. Skripsi tidak dipublikasikan. Semarang: Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Fauzy, Akhmad. 2011. *Statistik Nonparametrik*. Yogyakarta: Ardana Media.
- Halim, Abdul. 2001. *Anggaran Daerah dan Fiscal stress studi kasus pada Anggaran Daerah*

- Provinsi di Indonesia*.
Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro, Mudrajat. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Jogjakarta: UPP AMP YKPM
- Marzoeki, Ahmad. 2009. *Membangun Kemandirian Daerah*. Jakarta: Suara Merdeka
- Purnomo. 2009. "Analisis Kemandirian dan Kinerja Keuangan daerah Dalam Pelaksanaan otonomi Daerah Pada Pemerintah kota Yogyakarta, Semarang, dan Surakarta" Skripsi tidak dipublikasikan. Surakarta: Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Radianto. 1997. *Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II*. Jakarta: Prisma
- Reksohadiprojo, Sukanto. 2000. *Ekonomi Publik*. Jogjakarta: Andi
- Saefullah, Mochammad. 2000. "Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dalam Menunjang Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah" Skripsi tidak dipublikasikan. Bandung: Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan.
- Simanjuntak, Robert, 2001. *Kebijakan Pungutan Daerah di Era Otonomi, Domestic Trade, Decentralization and globalization*. Jakarta: A One Day conference. LPEM-UI.
- Sugiyanto. 2002. *Kemandirian dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Prisma
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi.